

Strategi Penguatan Pasokan dan Stabilisasi Harga Daging Sapi pada HBKN 2026

Strategy for Strengthening Supply and Stabilizing Beef Prices During HBKN 2026



M. Imron Fuadi, S. Pt., MP
(APHP Ahli Madya)

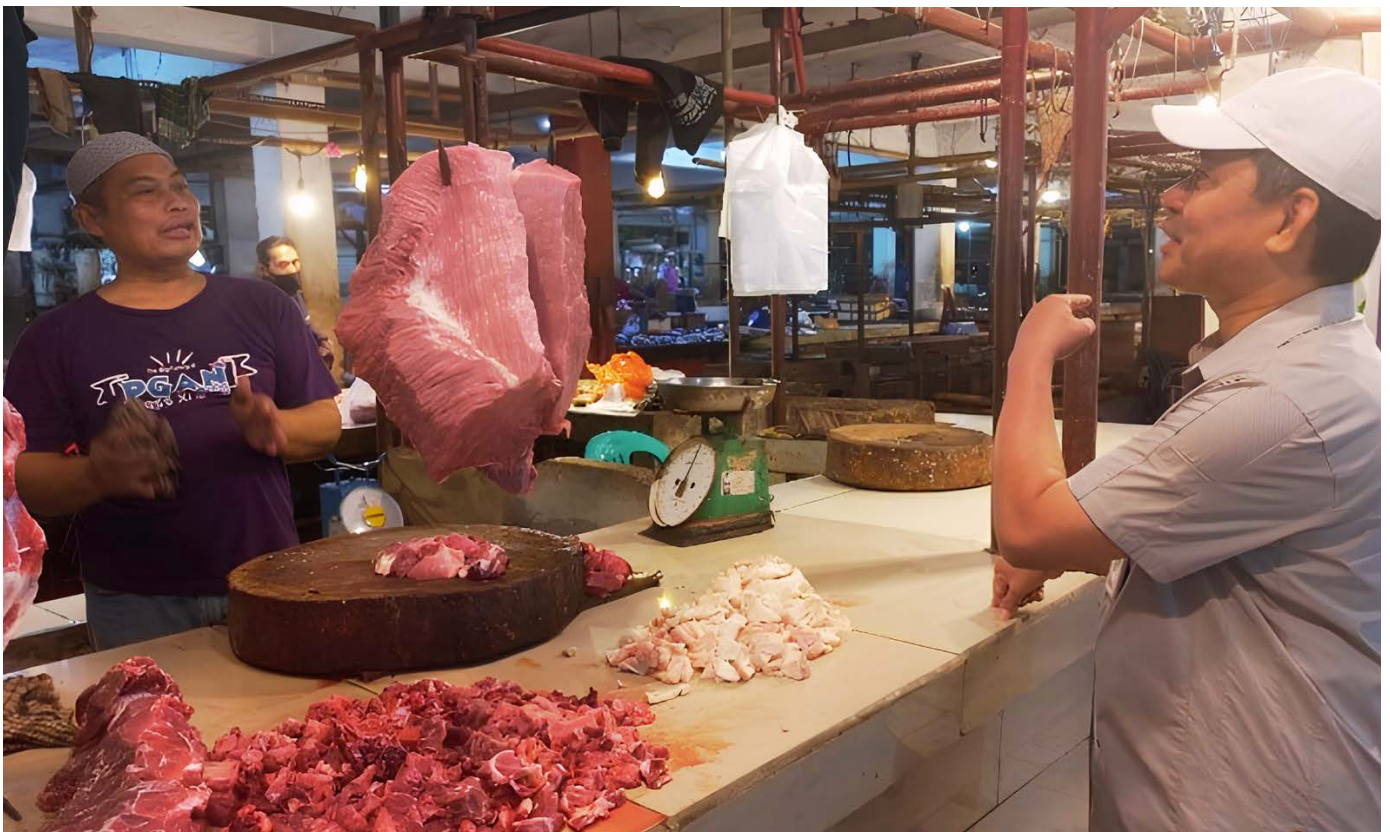
ID

Ketersediaan daging sapi nasional pada tahun 2026 diproyeksikan berada dalam kondisi yang relatif aman. Ketersediaan daging sapi nasional pada tahun 2026

diproyeksikan berada dalam kondisi yang relatif aman. Berdasarkan prognosa neraca daging sapi dan kerbau nasional yang disusun melalui rapat koordinasi teknis antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), total ketersediaan daging sapi sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,11 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi masyarakat diproyeksikan sebesar 794,29 ribu ton, sehingga secara keseluruhan neraca daging sapi nasional menunjukkan surplus sekitar 319,49 ribu ton.

EN

National beef availability in 2026 is projected to remain relatively secure. Based on the national beef and buffalo meat balance forecast prepared through technical coordination meetings between the Ministry of Agriculture, the National Food Agency (Bapanas), and Statistics Indonesia (BPS), total beef availability throughout 2026 is estimated to reach 1.11 million tons. Meanwhile, public consumption demand is projected at 794.29 thousand tons, resulting in an overall national beef surplus of approximately 319.49 thousand tons.



Surplus tersebut menjadi indikasi bahwa pasokan daging sapi nasional masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun, termasuk pada periode permintaan tinggi seperti Ramadan dan Idul Fitri. Perhitungan kebutuhan konsumsi sendiri menggunakan asumsi konsumsi reguler masyarakat sebesar 2,77 kilogram per kapita per tahun, yang mencerminkan rata-rata konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia. Ketersediaan daging sapi nasional bersumber dari beberapa komponen utama, yakni produksi sapi dan kerbau lokal, pemotongan sapi bakalan impor, serta impor daging sapi atau kerbau.



Produksi dalam negeri masih menjadi kontributor utama dengan estimasi mencapai 421,21 ribu ton daging, yang berasal dari pemotongan sekitar 2,15 juta ekor sapi dan kerbau lokal sepanjang tahun. Di sisi lain, pemotongan sapi bakalan impor diperkirakan menyumbang sekitar 189,70 ribu ton daging dari sekitar 700 ribu ekor sapi bakalan yang digemukkan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan impor daging sapi dan kerbau sebesar 304,32 ribu ton sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan nasional. Kebijakan impor tersebut dilakukan secara terukur untuk memastikan ketersediaan daging tetap terjaga, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Jika dilihat secara bulanan, kondisi pasokan pada awal tahun 2026 menunjukkan kecukupan stok yang cukup kuat. Pada Februari 2026, total ketersediaan daging sapi diperkirakan mencapai 223,92 ribu ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 55,30 ribu ton, sehingga neraca masih mencatat surplus 168,62 ribu ton. Memasuki Maret 2026, yang berdekatan dengan momentum Ramadan, total ketersediaan diperkirakan sebesar 226,04 ribu ton, dengan kebutuhan sekitar 65,81 ribu ton, sehingga masih tersisa surplus sekitar 160,23 ribu ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa stok daging sapi nasional berada pada level yang cukup aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah penguatan pasokan, mulai dari peningkatan produksi dalam negeri, pengaturan impor secara terukur, hingga pengawasan distribusi di pasar agar harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

This surplus indicates that national beef supply will remain sufficient to meet public demand throughout the year, including during periods of high demand such as Ramadan and Eid al-Fitr. Consumption projections are based on the assumption of regular public consumption of 2.77 kilograms per capita per year, reflecting the average beef consumption of Indonesian society. National beef supply is derived from several main components, namely local cattle and buffalo production, imported feeder cattle slaughter, and beef or buffalo meat imports.

Domestic production remains the primary contributor, with an estimated output of 421.21 thousand tons of meat, sourced from the slaughter of approximately 2.15 million local cattle and buffalo throughout the year. On the other hand, imported feeder cattle slaughter is expected to contribute around 189.70 thousand tons of meat from approximately 700 thousand feeder cattle fattened domestically.

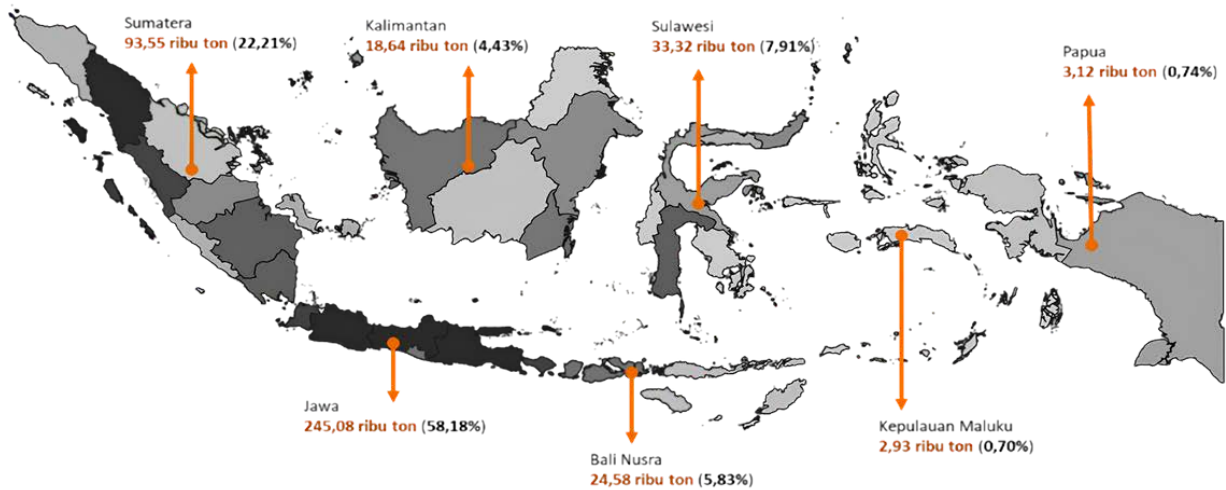
In addition, the government has projected beef and buffalo meat imports of 304.32 thousand tons as part of its strategy to maintain national supply balance. This import policy is implemented in a measured manner to ensure continued meat availability while maintaining price stability at the consumer level. On a monthly basis, supply conditions at the beginning of 2026 indicate strong stock adequacy.

In February 2026, total beef availability is estimated at 223.92 thousand tons, while public demand is approximately 55.30 thousand tons, resulting in a surplus of 168.62 thousand tons. Entering March 2026, which coincides with the Ramadan period, total availability is projected at 226.04 thousand tons, with demand of around 65.81 thousand tons, leaving a surplus of approximately 160.23 thousand tons.

This condition demonstrates that national beef stocks are at a sufficiently safe level to anticipate increased demand ahead of major religious holidays. The government continues to strengthen supply through various measures, including increasing domestic production, regulating imports carefully, and supervising market distribution to maintain stable and affordable prices for the public.

Peta Sebaran Produksi Daging Nasional

National Meat Production Distribution Map



Berdasarkan data produksi tahun 2026, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan kontribusi produksi daging sapi dan kerbau terbesar di Indonesia. Produksi daging di wilayah ini mencapai 245,08 ribu ton atau sekitar 58,18 persen dari total produksi nasional. Kontributor terbesar kedua berasal dari Pulau Sumatera dengan produksi sebesar 93,55 ribu ton atau sekitar 22,21 persen dari total produksi nasional. Peran Sumatera sangat penting sebagai wilayah penyangga pasokan daging nasional setelah Pulau Jawa.

Selanjutnya, beberapa wilayah lain juga memberikan kontribusi terhadap produksi nasional, antara lain Pulau Sulawesi dengan produksi 33,32 ribu ton (7,91 persen), Bali dan Nusa Tenggara sebesar 24,58 ribu ton (5,83 persen), serta Kalimantan sebesar 18,64 ribu ton (4,43 persen). Sementara itu, wilayah Papua dan Kepulauan Maluku turut memberikan kontribusi dalam jumlah yang lebih kecil namun tetap menjadi bagian dari sistem produksi daging nasional. Distribusi produksi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan daging nasional masih terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa langkah dalam penguatan pasokan dan stabilisasi harga daging sapi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Rantai Distribusi

Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menginstruksikan pengendalian harga yang ketat di seluruh lini distribusi. Fokus utama ditujukan pada sapi potong eks-impor, mulai dari tingkat penggemukan (feedlot), RPH, hingga ke pasar eceran. Pengendalian harga dilakukan secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi, dengan perhatian khusus pada sapi potong impor mulai dari tahap penggemukan (feedlot), RPH, hingga pasar eceran. Di level feedlot, pengawasan difokuskan pada harga bakalan, biaya pakan, dan efisiensi pemeliharaan agar harga awal tetap wajar.

Based on 2026 production data, Java Island remains the region with the largest contribution to beef and buffalo meat production in Indonesia. Meat production in this region reaches 245.08 thousand tons, or approximately 58.18 percent of total national production. The second-largest contributor is Sumatra Island, with production of 93.55 thousand tons, or around 22.21 percent of national production. Sumatra plays a crucial role as a supporting region for national meat supply after Java.

Other regions also contribute to national production, including Sulawesi with 33.32 thousand tons (7.91 percent), Bali and Nusa Tenggara with 24.58 thousand tons (5.83 percent), and Kalimantan with 18.64 thousand tons (4.43 percent). Meanwhile, Papua and the Maluku Islands contribute in smaller volumes but remain part of the national meat production system. This production distribution indicates that the majority of national meat supply remains concentrated in western Indonesia, particularly on Java and Sumatra.

Several measures that have been implemented to strengthen supply and stabilize beef prices are as follows:

1. Distribution Chain Control

The Minister of Agriculture, who also serves as Head of the National Food Agency (Bapanas), has instructed strict price controls across all distribution channels. The primary focus is on ex-import slaughter cattle, starting from feedlot operations, slaughterhouses (RPH), and extending to retail markets. Price control is implemented comprehensively throughout the distribution chain, with special attention to imported slaughter cattle from the fattening stage (feedlot), slaughterhouses (RPH), to retail markets. At the feedlot level, supervision focuses on feeder cattle prices, feed costs, and maintenance efficiency to ensure reasonable initial prices.

Di RPH, pengendalian mencakup biaya pemotongan, karkas, dan transparansi distribusi untuk mencegah manipulasi yang bisa memengaruhi harga. Sementara itu, di tahap perdagangan dan pasar eceran, fokus pengawasan adalah pada rantai pasok, margin keuntungan, serta praktik penimbunan atau spekulasi yang berpotensi menimbulkan kenaikan harga. Dukungan pemerintah melalui operasi pasar, penetapan harga acuan, dan sistem informasi harga juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha di seluruh rantai distribusi.

2. Penetapan Batas Harga Maksimal

Melalui Surat Dirjen PKH No. 27067/PK.330/F/01/2026 tertanggal 27 Januari 2026, pemerintah secara resmi menetapkan plafon harga jual untuk menjaga keterjangkauan: harga di Feedlot maksimal Rp55.000/kg berat hidup (BH). Dengan membatasi harga jual sapi hidup dari tempat penggemukan, pemerintah mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga akibat spekulasi. Harga di RPH maksimal Rp56.000/kg berat hidup (BH). Selisih Rp1.000 dari harga feedlot dialokasikan untuk biaya transportasi dan operasional jagal. Jika harga di RPH terkendali, maka harga modal daging bagi pedagang pasar eceran akan lebih stabil dan rendah.

3. Pengawasan Ketat melalui Satgas

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, dibentuklah Satgas Saber Pelanggaran Pangan berdasarkan SK Kepala Bapanas No. 4 Tahun 2026. Satgas lintas sektoral ini melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, hingga Satgas Pangan POLRI di tingkat pusat maupun daerah untuk menindak tegas setiap pelanggaran. Satgas Saber telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan penindakan secara intensif di seluruh lini distribusi pangan. Satgas ini, yang bersifat lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, serta Satgas Pangan POLRI baik di tingkat pusat maupun daerah, melakukan inspeksi rutin ke pasar tradisional, supermarket, gudang distribusi, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar harga, keamanan, dan mutu pangan. Selain itu, Satgas juga menindak tegas praktik penimbunan, manipulasi harga, dan peredaran pangan kadaluwarsa atau tidak layak konsumsi, melalui operasi gabungan dan penyidikan hukum bila diperlukan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen mengenai hak konsumen dan regulasi pangan juga rutin digelar, sehingga tercipta pengawasan berlapis dan transparan. Hasilnya, Satgas berhasil menekan pelanggaran serius serta meningkatkan kepatuhan pasar terhadap regulasi pangan, mendukung stabilitas harga, dan menjaga keamanan konsumsi masyarakat.

At slaughterhouses, controls cover slaughtering costs, carcass pricing, and distribution transparency to prevent manipulation that could affect prices. Meanwhile, at the trade and retail market stages, supervision emphasizes supply chains, profit margins, and hoarding or speculative practices that may trigger price increases. Government support through market operations, benchmark pricing, and price information systems is also essential in maintaining price stability, protecting consumers, and providing certainty for business actors throughout the distribution chain.

2. Establishment of Maximum Price Limits

Through Directorate General of Livestock and Animal Health Letter No. 27067/PK.330/F/01/2026 dated January 27, 2026, the government officially established maximum selling price ceilings to maintain affordability: feedlot prices are capped at IDR 55,000 per kilogram live weight. By limiting the selling price of live cattle from feedlots, the government seeks to prevent price spikes caused by speculation. Slaughterhouse (RPH) prices are capped at IDR 56,000 per kilogram live weight. The IDR 1,000 difference from feedlot prices is allocated for transportation and slaughter operational costs. If slaughterhouse prices remain controlled, meat capital prices for retail market traders will also become more stable and lower.

3. Strict Monitoring Through Task Forces

To ensure the effective implementation of this policy in the field, the Food Violation Eradication Task Force (Satgas Saber) was established under National Food Agency Decree No. 4 of 2026. This cross-sectoral task force involves relevant ministries/agencies, regional governments, and the National Police Food Task Force at both central and regional levels to take firm action against violations. Satgas Saber has carried out intensive monitoring and enforcement activities throughout all food distribution channels. This task force conducts regular inspections of traditional markets, supermarkets, distribution warehouses, and food business operators to ensure compliance with pricing standards, food safety, and quality requirements. In addition, the task force takes decisive action against hoarding practices, price manipulation, and the circulation of expired or unfit food products through joint operations and legal investigations when necessary. Educational activities and public awareness campaigns for traders and consumers regarding consumer rights and food regulations are also routinely conducted, creating layered and transparent supervision. As a result, the task force has successfully reduced serious violations, improved market compliance with food regulations, supported price stability, and safeguarded public food consumption safety.